



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE PROVINSI BENGKULU
TERKAIT EVALUASI PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK 2024
TANGGAL 25 JANUARI 2023**

I. PENDAHULUAN

A. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke Provinsi Bengkulu berjumlah 16 (enam belas) orang Anggota, dan dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR-RI, **Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (F-PG)**.

Nama-nama anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Bengkulu selengkapnya adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung | : | Ketua Tim/Ketua Komisi II DPR RI/F-PG |
| 2. Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH | : | Wakil Ketua Komisi II DPR RI/F-PDI Perjuangan |
| 3. Yanuar Prihatin, M.Si | : | Wakil Ketua Komisi II/F-PKB |
| 4. Drs. Cornelis, MH | : | Anggota/F-PDI Perjuangan |
| 5. Ir. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc | : | Anggota/F-PDI Perjuangan |
| 6. Riyanta | : | Anggota/F-PDI Perjuangan |
| 7. Rifqinizami Karsayuda, SH, MH | : | Anggota/F-PDI Perjuangan |
| 8. Aidah Muslimah, SE | : | Anggota/F-PG |
| 9. Ir. Arsyadjuliandi Rachman, MBA | : | Anggota/F-PG |
| 10. Dito Ganinduto, MBA | : | Anggota/F-PG |
| 11. Prasetyo Hadi | : | Anggota/F-P.Gerindra |
| 12. Rahmat Muhajirin, SH | : | Anggota/F-P.Gerindra |
| 13. Dr. Ir. Ongku P. Hasibuan, MM | : | Anggota/F-PD |
| 14. Wahyu Sanjaya, SE, MM | : | Anggota/F-PD |
| 15. Teddy Setiadi, S.I.Kom | : | Anggota/F-PKS |
| 16. Paulus Ubruangge | : | Anggota/F-PAN |

Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh Tenaga Ahli DPR RI (Satya Alvino Pinandito, MA dan Abrar Amir, ST, MAP), dan unsur dari Sekretariat Komisi II DPR-RI (Dahliya Bahnan, SH, MH; Muhdar Yusa, S.Sos; Endang Setia Purnama, SH; dan Eko Supriyanto), serta wartawan dari Bagian Pemberitaan DPR RI (Singgih Kinanti Rimbani) dan dari TV Parlemen (Julian Hari Saputra).

B. RUANG LINGKUP

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Bengkulu ini merupakan kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pelaksanaan Fungsi Pengawasan, yang secara khusus adalah terkait dengan evaluasi penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Bengkulu.

Terkait dengan tahapan Pemilu serentak 2024, KPU beserta jajarannya telah melaksanakan beberapa tahapan. Demikian pula Bawaslu dalam konteks pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan tersebut. Dari beberapa tahapan yang telah dilaksanakan tersebut terdapat berbagai masukan maupun aduan/laporan yang diterima oleh Komisi II DPR RI berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Terhadap berbagai laporan yang telah diterima tersebut, Komisi II DPR sesuai dengan kewenangan yang dimiliki selalu berupaya mengawasi kinerja penyelenggara Pemilu agar senantiasa berada dalam rel dan koridor sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Kunjungan spesifik yang dilaksanakan oleh Komisi II DPR RI ke Provinsi Bengkulu menjadi sangat penting karena disamping dapat melihat langsung kesiapan penyelenggara pemilu di daerah dalam melaksanakan tahapan pemilu, juga bisa mendapatkan gambaran secara utuh terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu di daerah baik yang sifatnya administratif maupun teknis operasional. Dengan demikian diharapkan dapat dilakukan pula langkah-langkah antisipatif terhadap berbagai hal yang berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan tahapan pemilu serentak 2024.

Pada Tahapan seleksi Panitia Ad Hoc Pemilu baik seleksi PPK dan seleksi Panwascam misalnya, disinyalir terdapat beberapa permasalahan ketidakpuasan peserta seleksi terhadap mekanisme seleksi dan bahkan terjadi gugatan di suatu daerah tentang indikasi kecurangan dan indikasi Politik uang yang disebut-sebut menyeret Anggota penyelenggara Pemilu.

Kemudian terkait masalah data Pemilih yang selalu menjadi permasalahan, Komisi II DPR RI ingin memastikan bahwa data pemilih harus benar dari hulunya terlebih dahulu, karena apabila data pemilihnya di hulu valid dan akurat, dan prosesnya juga dilakukan dengan benar, maka besar harapan tidak akan menimbulkan masalah di hilirnya juga akan benar.

Masalah lainnya yang juga perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan kesiapan SDM dan infrastruktur, serta koordinasi yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan para pemangku kepentingan dalam rangka menjaga kelancaran dan kondusifitas pelaksanaan pada setiap tahapan.

Dalam kunjungan ke Provinsi Bengkulu ini, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Bengkulu (diwakili oleh Wakil Gubernur Bengkulu) beserta jajarannya, Ketua KPU Provinsi Bengkulu beserta jajarannya, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu beserta jajarannya, serta dihadiri pula oleh perwakilan dari DPRD Provinsi Bengkulu, serta unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu yakni Polda, Korem, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, dan BINDA.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. PEMAPARAN KPU PROVINSI BENGKULU

1. Anggaran dan Kesiapan Infrastruktur

- KPU Provinsi Bengkulu telah menerima anggaran DIPA dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 16.851.585.000 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja rutin dan belanja pegawai sebesar Rp. 6.072.044.000,-
- b. Belanja tahapan pemilu sebesar Rp. 10.779.541.000,-

Anggaran tahun 2023 sebesar Rp.15.152.342.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja rutin dan belanja pegawai sebesar Rp. 8.593.164.000,-
- b. Belanja tahapan pemilu sebesar Rp. 6.559.178.000,-

- Besaran anggaran yang diterima tersebut belum seluruhnya dapat mengakomodir kebutuhan riil KPU Provinsi Bengkulu, yang akan dialokasikan untuk :
 - a. Sarana Prasarana;
 - b. Logistik;
 - c. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - d. Rekapitulasi Suara;
 - e. Evaluasi dan Pelaporan,

- f. Sengketa Hukum;
- g. Sosialisasi;
- h. Kampanye;
- i. Kenaikan Uang Kehormatan, Tunjangan Kinerja/Insentif.

▪ Infrastruktur Pendukung

Dalam hal kesiapan infrastruktur (bangunan kantor dan gudang), KPU Provinsi Bengkulu menyampaikan sebagai berikut :

Untuk bangunan kantor KPU Provinsi Bengkulu sudah memiliki kantor sendiri sejak Tahun 2021 yang merupakan bangunan hibah dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sedangkan untuk KPU Kabupaten/Kota, status Gedung kantor dan gudang adalah sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Status Gedung	Tahun Bangunan	Kondisi
1.	Kota Bengkulu	Milik KPU	Tahun 2006	Baik
2.	Rejang Lebong	Milik KPU	Hibah Tahun 2022	Butuh perbaikan/ renovasi
3.	Lebong	Milik KPU	Tahun 2013	Baik
4.	Seluma	Milik KPU	Tahun 2010	Baik
5.	Kepahiang	Milik KPU	Tahun 2005	Baik
6.	Kaur	Milik KPU	Tahun 2006	Baik
7.	Bengkulu Tengah	Milik KPU	Hibah Tahun 2021	Butuh Perbaikan
8.	Mukomuko	Milik KPU	Pinjam Pakai	Butuh Perbaikan
9.	Bengkulu Selatan	Pinjam Pakai		Butuh Perbaikan
10.	Bengkulu Utara	Pinjam Pakai		Baik

Sedangkan untuk gudang, ada KPU Kabupaten/Kota yang sudah memiliki gudang penyimpanan logistik, namun untuk gudang penyimpanan logistik pada tahapan Pemilu KPU Kabupaten/Kota tetap menyewa gudang dikarenakan gudang yang dimiliki tidak cukup untuk menyimpan logistik Pemilu yang sangat banyak. Adapun KPU Kabupaten/Kota yang sudah memiliki gudang adalah sebagai berikut:

- a. Kota Bengkulu (belum mencukupi)
- b. Kepahiang (belum mencukupi)
- c. Lebong (belum mencukupi)
- d. Seluma (belum mencukupi)

Untuk menghadapi Pemilu Tahun 2024 secara infrastruktur Gedung kantor dan gudang KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Kabupaten/Kota sangat membutuhkan anggaran untuk perbaikan Gedung kantor dan sewa gudang. Anggaran pemeliharaan gedung kantor setiap tahunnya sangat minim dan jauh dibawah standar biaya masukan (SBM).

2. Verifikasi Parpol

Proses verifikasi partai politik peserta pemilu yang dimulai pada tahapan pendaftaran pada tanggal 1-14 Agustus 2022, verifikasi administrasi pada tanggal 2 Agustus-14 Oktober 2022, verifikasi faktual 15 Oktober-14 Desember 2022, Penetapan Partai Politik dan Pengundian Nomor Urut pada tanggal 14 Desember 2022 berjalan dengan sesuai dengan tahapan regulasi, tidak ada dinamika yang terjadi antara KPU Provinsi Bengkulu dan Partai Politik selama tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik. Hal itu dikarenakan KPU Provinsi Bengkulu aktif membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pengurus Partai Politik yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu.

3. Seleksi PPK dan PPS

- Tingkat antusiasme masyarakat di Bengkulu untuk menjadi penyelenggara adhoc PPK dan PPS pada pemilu tahun 2024 cukup tinggi dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu yang lalu, hal tersebut dikarenakan meningkatnya kesejahteraan yang diterima, antara lain meningkatnya besaran honorarium serta jaminan/santunan kecelakaan kerja.
- Dalam rekrutmen badan ad hoc PPK keperluan pemilu tahun 2024 untuk pertama kalinya menggunakan sistem aplikasi SIAKBA, hal tersebut mengharuskan pelamar memahami Teknologi Informasi. Dampak positif dari penggunaan aplikasi tersebut bertujuan agar output yang dihasilkan dari peserta yang lulus menjadi anggota PPK dan PPS melek/paham terkait penggunaan Teknologi Informasi, dikarenakan dalam pelaksanaan tugasnya banyak yang memanfaatkan sarana Teknologi Informasi.

- Serupa halnya dengan penggunaan aplikasi SIAKBA, pada pemilu 2024 metode seleksi tertulis untuk penyelenggara ad hoc PPK dan PPS menggunakan system Computer Asistet Test (CAT), hal tersebut bertujuan untuk menjaring peserta secara objektif, professional dan transparan, yang mana dalam pelaksanaannya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu telah secara maksimal melakukan sosialisasi terkait pelaksanaannya.
- Terhadap proses seleksi penyelenggara ad hoc PPS, dengan jumlah pelamar yang cukup banyak, terdapat kendala kurangnya fasilitas laboratorium CAT di beberapa Kabupaten/Kota, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut kerja keras untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain dengan menempatkan lokasi pelaksanaan CAT di banyak titik bagi Kabupaten yang banyak fasilitasnya, serta memperbanyak sesi bagi Kabupaten/Kota yang kekurangan fasilitas sehingga pelaksanaannya memakan waktu sampai malam.
- Permasalahan pemahaman bagi peserta yang lulus seleksi CAT, dimana peserta menganggap seleksi CAT merupakan hal pokok dalam pelaksanaan seleksi, sementara untuk menjadi penyelenggara ad hoc tidak hanya sebatas memiliki keilmuan secara teori, namun harus memenuhi banyak aspek khususnya pemahaman kepemiluan dalam tatanan praktek. Untuk itulah guna menguji pemahaman tersebut terhadap peserta dilanjutkan dengan seleksi wawancara yang mana dalam prosesnya untuk mengetahui rekam jejak serta menggali kemampuan peserta terhadap penyelenggaraan pemilu yang belum tergali secara maksimal pada saat CAT, antara lain terkait integritas, solidaritas, soliditas, kepemimpinan dan lain sebagainya.
- Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 pembentukan pantarlih dimulai pada tanggal 26 Januari s.d 6 Februari 2023 sedangkan pembentukan KPPS pada tanggal 5 s.d 25 Januari 2024.

4. Pembentukan Sekretariat PPK

Dalam pembentukan sekretariat badan ad hoc pada pemilu 2024 didapati kendala berupa lambatnya birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sehingga pembentukan sekretariat badan ad hoc terlambat, untuk mengatasi permasalahan tersebut kedepan dapat diatasi dengan upaya antara lain :

- a. Memberikan kewenangan kepada KPU untuk membentuk sekretariat;

- b. Mendelegasikan kewenangan pembentukan sekretariat kepada pemerintahan kecamatan, yang mana pada prosesnya Camat dapat menggunakan kewenangannya untuk dan atas nama Bupati/Walikota.

5. Penataan Dapil dan Alokasi Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota

- Sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 dan Keputusan Nomor 488 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi yang disusun KPU Kabupaten/Kota memperhatikan 7 (tujuh) prinsip yaitu Kesetaraan nilai suara, Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, Proporsionalitas, Integralitas wilayah, Berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan. Hasil rancangan tersebut kemudian KPU Kabupaten/Kota dilakukan uji publik beberapa kali untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari publik dengan melibatkan pemerintah daerah, forkompinda, ormas, media massa, LSM, akademisi, pemilih pemula dan sebagainya. Uji publik yang telah dilakukan kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi Bengkulu. Selain itu, KPU Provinsi Bengkulu juga menyusun rancangan dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2024. KPU Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi dapil dan alokasi kursi dengan melibatkan Pemerintah daerah, Forkompinda, ormas, media massa, LSM, akademisi, pemilih pemula dan sebagainya. Ada 2 (dua) rancangan dapil yang diajukan KPU Provinsi Bengkulu pasca sosialisasi tersebut. Pada tanggal 19 Januari 2023 KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan uji publik dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Provinsi di Hotel Mercure Bengkulu.
- Terhadap pendapilan kabupaten/kota di Bengkulu tidak ada perubahan, hanya terjadi perubahan nama dan nomor dapil walaupun terjadi penambahan dan pengurangan jumlah penduduk di kabupaten/kota. Namun KPU Provinsi Bengkulu mengusulkan 2 (dua) rancangan dapil dan alokasi kursi pada Pemilu Tahun 2024. Rancangan 1 sama dengan dapil dan alokasi kursi pada Pemilu Tahun 2019 namun hanya terjadi penambahan alokasi kursi di dapil Bengkulu 2 yang semula dari 8 menjadi 9 kursi dan pengurangan alokasi kursi di dapil Bengkulu 5 yang semula 4 menjadi 3 kursi sedangkan rancangan 2 terjadi perubahan nama dapil dan alokasi kursi.

6. Pemutakhiran Data Pemilih

- DP4 Provinsi Bengkulu untuk Pemilu Tahun 2024 berjumlah : 1.503.160 yang tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten Kota. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 104.052 dari DPT Provinsi Bengkulu Pemilu Tahun 2019 yang berjumlah 1.399.108 pemilih.

PERBANDINGAN DP4 PEMILU TAHUN 2024 DENGAN DPT PEMILU 2019 PROVINSI BENGKULU

PROVINSI	KD_KAB	KABUPATEN/KOTA	DP4 PEMILU 2024	DPT PEMILU 2019	SELISIH
BENGKULU	1701	BENGKULU SELATAN	126.477	115.777	10.700
BENGKULU	1702	REJANG LEBONG	212.547	203.336	9.211
BENGKULU	1703	BENGKULU UTARA	216.055	210.114	5.941
BENGKULU	1704	KAUR	97.387	89.564	7.823
BENGKULU	1705	SELUMA	159.379	137.693	21.686
BENGKULU	1706	MUKO MUKO	137.927	126.249	11.678
BENGKULU	1707	LEBONG	82.817	77.225	5.592
BENGKULU	1708	KEPAHIANG	114.608	108.405	6.203
BENGKULU	1709	BENGKULU TENGAH	87.043	82.123	4.920
BENGKULU	1771	KOTA BENGKULU	268.920	248.622	20.298
		TOTAL	1.503.160	1.399.108	104.052

- KPU Provinsi Bengkulu menerima data kependudukan sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data pemilih tidak melalui Pemerintah Provinsi melainkan langsung dari KPU RI. Sebagaimana diatur dalam regulasi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (pasal 201).

KPU bertugas memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih.

Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) diserahkan oleh Kemendagri ke KPU Republik Indonesia. Untuk Pemilu Tahun 2024, DAK2 diserahkan secara resmi dari Kemendagri ke KPU Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2022 sedangkan DP4 diserahkan secara resmi dari Kemendagri ke KPU Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember 2022. Untuk pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024, KPU Republik Indonesia menyampaikan data hasil penyandingan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dalam bentuk *by name by address* melalui Sidalih.

- Terkait dengan daftar pemilih di lokasi khusus, saat ini masih dalam tahap persiapan, berupa sosialisasi dan koordinasi dengan pihak – pihak di titik lokasi khusus yang terdapat pemilih potensial, yaitu di LAPAS/RUTAN dan beberapa Perusahaan Perkebunan dan perusahaan Tambang. Berdasarkan hasil koordinasi sementara, daftar pemilih potensial di Lokasi Khusus yang sudah diperoleh berjumlah 3.013 pemilih di 16 TPS, tersebar di 4 Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu.

7. Persiapan Pelaksanaan Coklit

- KPU Provinsi Bengkulu dengan 10 Kabupaten/Kotanya siap menggelar tahapan Coklit. Saat ini Pemetaan TPS sudah dilakukan, dan sudah diperoleh jumlah kebutuhan SDM Pantarlih dan kebutuhan sarana yang melingkupinya, antara lain; tanda pengenal petugas dalam bentuk ID Card, rompi, topi, stiker, lembar kerja juga buku panduan Coklit yang saat ini sedang dalam proses pengadaan/pencetakan. Berikut jumlah dan sebaran TPS dimaksud sebagai berikut :

**REKAPITULASI TPS BERDASARKAN DATA HASIL SINKRONISASI PDPB DAN DP4 PEMILU TAHUN 2024
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU**

NO	NAMA KABUPATEN /KOTA	JUMLAH KECAMATAN	RANCANGAN JUMLAH TPS	DATA PEMILIH		
				LK	PR	JUMLAH (4+5)
1	2	3	4	5	6	7
1	BENGKULU SELATAN	11	601	63.470	62.945	126.415
2	BENGKULU TENGAH	11	391	44.094	42.928	87.022
3	BENGKULU UTARA	19	876	109.548	106.400	215.948
4	KAUR	15	437	49845	47471	97.316
5	KEPAHIANG	8	547	58.589	56.004	114.593
6	KOTA BENGKULU	9	1.252	131.798	137.096	268.894
7	LEBONG	12	369	41.925	40.862	82.787
8	MUKOMUKO	15	586	70.326	67.402	137.728
9	REJANG LEBONG	15	863	107.527	105.008	212.535
10	SELUMA	14	657	81.698	77.650	159.348
TOTAL		129	6.579	758.820	743.766	1.502.586

- Proses penerimaan pantarlih dilakukan cukup selektif, petugas yang direkrut memiliki dedikasi, teliti dan cermat dalam pendataan, serta memiliki dan mampu menggunakan handphone android yang akan digunakan sebagai alat kerja

Pantarlih. Coklit yang akan dilakukan dalam pemutakhiran data pemilih pemilu 2024 menggunakan alat kerja yang disebut dengan e-Coklit.

- Penggunaan e-Coklit dalam kegiatan Coklit dapat meningkatkan ketepatan dalam pendataan, mereduksi kekeliruan dalam pencatatan, memastikan perkembangan kerja Pantarlih yang dapat dipantau secara digital. Sehingga dipastikan Pantarlih bekerja turun ke lapangan memastikan secara de jure pemilih yang terdata dalam A. Pemilih, mengubah data apabila ada perubahan data pemilih berdasarkan dokumen yang ditunjukkan pemilih, dan mencoret pemilih yang ada dalam terdaftar bila ditemukan sudah tidak memenuhi syarat.

8. Penggunaan Sistem Informasi

KPU memiliki beberapa sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan dan terpusat di KPU RI, antara lain :

- a. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)
- b. Sistem Informasi Pencalonan (SILON)
- c. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)
- d. Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA)
- e. Sistem Informasi Daerah Pemilih (SIDAPIL)
- f. Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM)
- g. Sistem Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (SIREKAP)

Dalam penggunaannya, tidak ada permasalahan dalam menjalankan sistem informasi tersebut dikarenakan KPU RI menyelenggarakan bimtek penggunaan sistem informasi.

9. Tahapan Pencalonan Anggota DPD RI

- Untuk di Provinsi Bengkulu tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD sejak dibuka penyerahan dukungan pada tanggal 16-29 Desember 2022 ada 12 (dua) belas orang, yaitu Abdul Kharis Ma'mun, Ahmad Kanedi, Andrian Wahyudi, Def Tri Hardianto, Destita Khairilisani, Edi Agusdin, Elisa Ermasari, Imron Rosyadi, Leni Haryati John Latief, Patrice Rio Capella, Rahiman Dani dan Sultan Baktiar Najamudin. Pada tanggal 15 Januari 2023 KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu. Hasilnya 8 (delapan) Bakal Calon DPD dinyatakan memenuhi syarat, yaitu Abdul Kharis Ma'mun, Ahmad Kanedi, Andrian Wahyudi, Destita Khairilisani, Edi Agusdin, Imron Rosyadi, Rahiman Dani, dan Sultan Baktiar Najamudin sedangkan yang dinyatakan

Belum Memenuhi Syarat sebanyak 4 (empat) bakal calon, yaitu Def Tri Hardianto, Elisa Ermasari, Leni Haryati John Latief dan Patrice Rio Capella. Terhadap 4 bakal calon yang melakukan perbaikan masih dalam proses verifikasi administrasi di tingkat kabupaten/kota.

- Verifikasi faktual akan dilakukan setelah 4 (empat) bakal calon telah selesai tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu pada tanggal 23 Januari – 1 Februari 2023 dan dilanjutkan pada tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Perseorangan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu pada tanggal 6 s.d 26 Februari 2023.
- Hingga saat ini belum terdapat gugatan yang diterima oleh KPU pada tahapan pencalonan Anggota DPD RI di provinsi Bengkulu.

10. Sosialisasi dan Koordinasi

- Upaya yang dilakukan KPU Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2024 yaitu dengan melakukan **sosialisasi tatap muka dengan sistem kemitraan** stakeholder terkait, media massa (cetak, elektronik dan daring), ormas, OKP, Pemilih Pemula dan sebagainya. **Sosialisasi melalui website dan media sosial**. Selain itu sosialisasi melibatkan media cetak, media elektronik dan media daring (online), Baliho, Billboard, dan Video Tron. Program unggulan KPU Provinsi Bengkulu adanya **Remaja Sahabat KPU** yang merupakan satu-satu di Indonesia. Remaja Sahabat KPU terdiri dari anak-anak sekolah setingkat SMA sederajat yang terbentuk sejak Tahun 2016 sampai saat ini. Forum ini sangat membantu KPU Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi khususnya kepada pemilih pemula untuk berpartisipasi pada pemilu maupun pemilihan.
- KPU Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Bawaslu, Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah, Forkopimda selama proses Tahapan Pemilu 2024 yang sedang berjalan. Hal itu terlihat setiap kegiatan tahapan semua pihak dimaksud diatas selalu dilibatkan.

11. Permasalahan Lainnya

Saat ini berdasarkan data nominaif pegawai KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2022 berjumlah 46 (empat puluh enam) dengan rincian ASN berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang dan PPNPN berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Kondisi tersebut dirasa sangatlah kurang. Begitu juga ditingkat kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Kendati demikian, KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dengan keterbatasan SDM tetap siap dan semangat menyelenggarakan Pemilu dan

Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan jadwal tahapan dan regulasi. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh KPU Republik Indonesia telah mengadakan seleksi Pengawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahun 2022 dan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penambahan Jumlah dan Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

B. PEMAPARAN BAWASLU PROVINSI BENGKULU

1. Pengawasan Verifikasi Parpol

Pengawasan Verifikasi Partai Politik yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu berpedoman pada UU Pemilu, Peraturan Bawaslu serta turunannya, kemudian juga dengan memperhatikan Peraturan KPU. Untuk verifikasi partai politik tidak ada gugatan, baik laporan dan temuan yang ditujukan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu.

2. Seleksi Panwasdam dan Panwas kelurahan/Desa

Berkaitan dengan seleksi Panwas adhoc, untuk tingkat kecamatan (Panwasdam) sudah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan internal yang muncul dan dapat diselesaikan sesuai pada tingkatannya, kemudian ada satu laporan aduan ke DKPP, tetapi status laporan tersebut di DKPP masih Belum Memenuhi Syarat (BMS). Untuk seleksi Panwaslu Kelurahan/Desa baru masuk pada tahap pendaftaran dan Pengawas TPS masih dalam persiapan, karena jumlah TPS belum ditentukan.

3. Pembentukan Sekretariat Panwasdam

Seluruh Sekretariat Panwasdam sudah terbentuk di Bengkulu, saat ini sedang dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kerja dari Panwasdam. Bimbingan teknis sudah dilakukan khususnya sesuai dengan tahapan yang sudah berjalan.

4. Pengawasan Penataan Dapil

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait penataan Dapil sudah dilakukan dan belum ada temuan dan aduan dari Partai Politik, Ormas, LSM atau dari masyarakat terkait hal tersebut.

5. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih

Bawaslu Provinsi Bengkulu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu terkait DP4 tersebut, KPU Provinsi Bengkulu telah melaksanakan perbandingan daftar pemilih DP4 dengan pemilu terakhir. Untuk pengawasan lokasi khusus Bawaslu Provinsi Bengkulu menurunkan surat intruksi dan alat kerja pengawasan ke Bawaslu

Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi potensi pemilih dilokasi khusus, laporan dari Kabupaten/Kota dilaporkan ke Bawaslu Provinsi dalam bentuk laporan mingguan selama bulan Desember 2022. Bawaslu Provinsi Bengkulu mengidentifikasi sebanyak 139 potensi lokasi khusus yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. Hasil identifikasi terdapat potensi pemilih dilokasi khusus seperti, Lapas, Pondok Pesantren, Perusahaan Perkebunan, Lokasi Transmigrasi dan Rumah Sakit. Lokasi khusus ini berpotensi akan menambah TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

6. Persiapan Pengawasan Pelaksanaan Coklit

Kesiapan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan jajaran Pengawasan dalam mengawasi Coklit yaitu melaksanakan Bimbingan Teknis kemudian diskusi regulasi daftar pilih seperti PKPU/Perbawaslu melalui aplikasi zoom, melaksanakan rapat koordinasi dengan Bawaslu kabupaten/kota pertemuan tatap muka. Strategi pengawasan coklit pertama dengan pengawasan melekat terhadap PPDP/Pantarlil, kedua Bawaslu Berkoordinasi dengan Dukcapil dan Instansi terkait terhadap data TMS, selanjutnya Bawaslu Provinsi Bengkulu juga membuat alat kerja dalam rangka mengidentifikasi data TMS maupun MS.

7. Penggunaan Sistem Informasi

Berkaitan dengan Sistem Informasi yang ada di KPU maupun Bawaslu yang ada untuk mendukung tahapan Pemilu, sudah dilakukan pengaplikasiannya, permasalahan yang kadang masih terjadi adalah *down server* yang mengakibatkan membutuhkan waktu lama sampai sistem normal.

8. Pengawasan Pencalonan Anggota DPD RI

Pengawasan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD sudah dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada, tidak ada gugatan dari bakal calon sampai saat ini, persiapan Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam pengawasan ini adalah dengan melakukan pengawasan langsung, mengisi alat kerja serta membuat dan menyusun alat kerja untuk diturunkan ke jajaran.

9. Indeks Kerawanan Pemilu

- Indeks Kerawanan Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Bengkulu diangka 3,79 dengan rawan rendah. Untuk IKP Bawaslu Provinsi Bengkulu berdasarkan Dimensi yaitu: Dimensi Konteks Sosial Politik berada di angka 8,22 dengan level rendah, Dimensi Penyelenggara Pemilu di angka 4,12 dilevel rendah, Dimensi Kontestasi diangka

0,00 dilevel rendah, dan dimensi partisipasi diangka 0,00 dilevel sedang (level yang berbeda disetiap dimensi dikarenakan range yang berbeda).

- Sedangkan untuk IKP berdasarkan agregasi Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu berada di angka 19,4 dengan level sedang dengan rincian setiap dimensi adalah: Dimensi Sosial Politik berada diangka 22,26 dengan level sedang, dimensi penyelenggara pemilu diangka 26,13 dilevel sedang, dimensi kontestasi diangka 12,2 dilevel rendah, dan dimensi partisipasi diangka 0,48 dilevel rendah.
- Untuk meminimalisir permasalahan dari dimensi dan subdimensi IKP di setiap Kabupaten/Kota maka Bawaslu Provinsi Bengkulu menyusun strategi pencegahan seperti sosialisasi, himbauan, kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti perguruan tinggi, OKP, OMS, dan lain-lain.

10. Koordinasi

Koordinasi yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada instansi terkait adalah dengan melakukan audiensi, melakukan rapat koordinasi. Untuk Sentra Gakkumdu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bengkulu sudah dibentuk dan berjalan.

11. Permasalahan Lainnya

- Masih dirasakan terdapat kekurangan pada bagian sarana dan prasarana pendukung, seperti kondisi kantor yang belum memadai, terbatasnya ruangan dalam kantor, masih kurangnya PC/Laptop pada beberapa daerah, khususnya kecamatan yang kesulitan internet.
- Kondisi PPNPNS di Bawaslu Provinsi Bengkulu saat ini sejak adanya edaran yang membatasi masa kerja masih kondusif, karena beberapa tugas-tugas sekretariat masih bertumpu pada PPNPNS. Hal ini dikarenakan dari awal Bawaslu terbentuk yang mengerjakan hampir seluruh pekerjaan teknis adalah PPNPNS. Permasalahan yang muncul jika ada penarikan PNS oleh Pemerintah Daerah akan berdampak pada kosongnya pengisian jabatan Kepala Sekretariat dan Bendahara karena hampir semua PNS yang ada di jajaran Kabupaten/Kota dan Kecamatan hanya Kepala Sekretariat dan Bendahara, sehingga dapat menyebabkan terganggunya kerja pengawasan.

III. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 di wilayah Provinsi Bengkulu relatif berjalan lancar dan kondusif karena penyelenggara pemilu aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, Forkopimda, dan elemen masyarakat lainnya di Provinsi Bengkulu, serta tidak terdapat gugatan pada tahapan-tahapan yang telah dilalui, termasuk dalam hal penataan dapil dan pengalokasian jumlah kursi.
2. Alokasi anggaran yang didapatkan oleh KPU dan Bawaslu di Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya dapat mengakomodir semua biaya yang dibutuhkan, terutama untuk perbaikan gedung kantor dan biaya sewa gudang.
3. Meningkatnya besaran honorarium dan adanya santunan kecelakaan kerja telah berdampak pada meningkatnya pula tingkat antusiasme masyarakat untuk menjadi penyelenggara adhoc, baik di KPU maupun Bawaslu di Provinsi Bengkulu.
4. Masalah jaringan internet terkadang menjadi kendala dalam penggunaan sistem informasi yang harus diaplikasikan oleh penyelenggara pemilu di Provinsi Bengkulu.
5. Masalah keterbatasan jumlah SDM seringkali menjadi kendala bagi KPU dan Bawaslu di wilayah Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja yang dapat kami sampaikan. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI akan menjadi catatan bagi Komisi II DPR RI untuk nantinya akan ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan wewenang Komisi II DPR RI, yang diharapkan dapat menemukan solusi terbaik dalam rangka penyelesaian masalah yang ada, sehingga dengan demikian diharapkan dapat dilakukan pula langkah-langkah antisipatif terhadap berbagai hal yang berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan tahapan pemilu serentak 2024. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2023

Ketua Tim

Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung
A-270

